

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Jakarta telah lama dikenal sebagai ibu kota negara Indonesia, yang terdiri dari lima wilayah administrasi, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Bagian sisi lain gemerlapnya kota Jakarta menyimpan berbagai permasalahan yang tak kunjung terselesaikan, salah satunya yaitu permasalahan kemiskinan di Jakarta.

Permasalahan ini bermula dari krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, sekitar tahun 1998-an, telah memberikan dampak negatif pada perkembangan berbagai sektor, meliputi sektor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Salah satu dampak yang paling utama adalah pada sektor sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dapat berpengaruh pada sektor-sektor yang lainnya. Dampak yang diakibatkan oleh krisis ekonomi dan moneter tersebut yang sangat nyata adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya, yang artinya bahwa semakin banyak masyarakat yang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Krisis ekonomi ini telah meningkatkan permasalahan di sektor sosial dan ini termanifestasikan dengan semakin meningkatnya jumlah anak jalanan di kota besar maupun di wilayah pinggiran. Berdasarkan hasil survey terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial menunjukkan bahwa:

Tabel. 1
Tabel jumlah anak jalanan tahun 2006-2012

Tahun	Jumlah anak jalanan
2006-2007	144.000 jiwa
2007-2008	104.000 jiwa
2008-2009	148.890 jiwa
2009-2010	160.000 jiwa
2010-2011	180.000 jiwa
2011-2012	230.000 jiwa

Sumber : Pusat Data dan informasi Kementerian Sosial

Dari survey tabel di atas mengungkapkan bahwa setiap tahunnya di Indonesia anak jalanan mengalami peningkatan. Fenomena merebaknya anak jalanan ini merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan sebenarnya bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak berkecukupan, tidak bermasa depan jelas dan bahkan keberadaan mereka tidak jarang hanya menjadi (benalu) atau menjadi masalah bagi banyak pihak, baik keluarga, masyarakat, dan juga negara. Tetapi alasan turunnya anak-anak tersebut ke jalanan adalah karena anak-anak tersebut memang harus membantu perekonomian kedua orang tuanya atau untuk membayar uang sekolah dengan berjuang menjadi pengamen, penjual koran, tukang semir, pedagang asongan dan lain-lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar amandemen keempat Bab XIV tentang Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1 yaitu :
“ Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”¹

Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tersebut belum memiliki mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial, yaitu emosi dan mental mereka yang masih belum terkontrol, yang akhirnya melahirkan pencitraan yang negatif oleh sebagian masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikkan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri dan sebagainya. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, Terpenting dalam hal penanganan anak jalanan tersebut dibutuhkan penanganan khusus sebab merekalah yang nantinya sebagai penerus bangsa, jadi jangan sampai anak-anak penerus bangsa ini tidak mempunyai masa depan yang jelas hingga bahkan putus sekolah. Pada dasarnya setiap bangsa memiliki nilai-nilai yang sangat menjunjung tinggi pendidikan bagi rakyatnya. Karena sejatinya pendidikan adalah bagian dari sendi pembangunan dan kesejahteraan yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan dan pendidikan memiliki nilai yang sangat erat demi mempertahankan kekokohan serta kejayaan setiap bangsa, bahkan pendidikan sangat mempengaruhi peradaban serta pola

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab XIV Pasal 34 (1), h. 161

pergaulan antar bangsa. Semakin maju pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin maju pula peradaban pembangunan maupun kesejahteraan bangsa.

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah akhlak peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal sukses tidaknya pembangunan fisik itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohaniah atau spiritual, yang secara bulat diartikan pembangunan manusia, dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar perubahan keempat Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat 1 yaitu :
“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”²

Dalam hal ini pemerintah merupakan pihak yang paling utama dalam pemenuhan anak-anak jalanan memperoleh pendidikan. Apalagi dengan adanya program pemerintah, yaitu BOS (Biaya Operasional Sekolah) pemerintah menjamin anak untuk memperoleh pendidikan gratis belajar 9 tahun, khususnya di DKI Jakarta pada tahun 2013 sudah mencanangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Meski biaya pendidikan sudah diringankan oleh pemerintah, tetapi masih banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Mereka

² Sekretariat Jenderal MPR RI 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab XIII Pasal 31 (1), h. 158

menganggap bahwa biaya pendidikan masih terbilang mahal, memang untuk SPP sekolah sudah dibebaskan, tetapi untuk hal operasional sekolah seperti membeli seragam sekolah, LKS, bimbingan belajar sampai biaya transportasi, masyarakat harus mengeluarkan biaya lagi. Inilah yang menyebabkan masyarakat menganggap biaya pendidikan masih dirasa mahal. Jangankan untuk membiayai pendidikan yang mahal, untuk biaya hidup sehari-hari masyarakat miskin masih jauh dari kelayakan. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi diperlukan peran masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam membantu memperjuangkan masyarakat miskin agar anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan, dari sebuah Pondok pesantren yang melahirkan sebuah organisasi masyarakat di Jakarta inilah yang biasa disebut Ormas Betawi. Melalui Organisasi Masyarakat Betawi seakan memiliki ruang publik untuk mengekspresikan dirinya, bahwa mereka sesungguhnya ikut andil yang besar untuk membangun Ibu kota negara. Seiring dengan sejarah berdirinya, ternyata Organisasi Masyarakat Betawi mengalami proses perjalanan yang berliku-liku, dari yang pro dan kontra tentang keberadaan organisasi masyarakat ini, ternyata banyak menghadapi rintangan baik dari luar maupun dari dalam. Karena dianggap sebagai sebuah organisasi yang radikal serta wadah preman yang terorganisir.

Meski disudutkan oleh pihak-pihak yang berparadigma buruk tentang Organisasi Masyarakat yang anarkis, tetapi Organisasi Masyarakat Betawi mempunyai program dan cita-cita yang mulia, yaitu membina dan memberdayakan anak-anak jalanan dalam memperoleh pendidikan melalui

pondok pesantren. Ormas Betawi selama ini berjuang demi masyarakat Jakarta, menjadi garda terdepan dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Terbukti dari program Pemberdayaan Masyarakat, Ormas Betawi menjadi sebuah program positif, yang bermanfaat bagi perkembangan dan ketidak berdayaan anak-anak jalanan dari kemiskinan. Program pemberdayaan Masyarakat memberikan paradigma baru yang positif yang menjadikan Ormas Betawi sebagai Organisasi Masyarakat yang masih peduli terhadap anak-anak jalanan.

Tetapi pada kenyataannya anak-anak jalanan ini tidak semuanya mau diarahkan atau diberdayakan, sebab anak-anak jalanan tersebut sejatinya menginginkan kebebasan yang benar-benar tidak ada aturan, karena anak-anak jalanan tersebut sudah terbiasa dengan kehidupan yang bebas aturan, sedangkan di dalam program pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Ormas Betawi ini diharapkan anak-anak jalanan bisa merubah (*mind set*) agar lebih baik. Terbukti walaupun Ormas Betawi mengadakan program Pemberdayaan, masih banyak anak-anak jalanan yang tidak mau diatur dan masih banyak anak-anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas sangat penting dilakukan penelitian tentang bagaimana peranan organisasi masyarakat dalam pemberdayaan anak jalanan melalui pondok pesantren. Karena Organisasi Masyarakat Betawi merupakan salah satu elemen penting yang mempunyai peranan dalam hal memperjuangkan anak-anak penerus bangsa dalam memperoleh pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang menyangkut peranan organisasi masyarakat betawi dalam pemberdayaan anak jalanan melalui pondok pesantren, yaitu:

1. Bagaimana peranan organisasi masyarakat betawi dalam program pemberdayaan anak jalanan melalui pondok pesantren?
2. Bagaimana proses organisasi masyarakat betawi dalam menjalankan program pemberdayaan anak jalanan melalui pondok pesantren?
3. Apakah anak-anak jalanan yang sudah mengikuti program pemberdayaan lebih sejahtera dan mandiri, dibanding yang tidak mengikuti program?
4. Bagaimana upaya organisasi masyarakat betawi dalam program pemberdayaan anak jalanan?

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan pada penelitian ini akan dibatasi yaitu tentang bagaimana peranan organisasi masyarakat, organisasi yang dimaksud, yaitu Ormas Betawi dan Pemberdayaan Anak jalanan melalui pondok pesantren dalam bidang Pendidikan di Pondok Pesantren yatim ziyadatul mubtadi'ien Jl. Raya penggilingan No.100 Pedaengan Cakung – Jakarta Timur. Anak jalanan dimaksud yang biasa nongkrong di daerah terminal pulo gadung, lampu merah cakung dan daerah sekitar tempat penelitian. Peranan yang dimaksud adalah Ormas Betawi sebagai

organisasi dalam lingkup Pusat sedangkan pemberdayaan anak jalanan disini maksudnya pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas Ormas Betawi serta untuk mencapai pengembangan diri anak-anak jalanan. Pondok Pesantren disini untuk membentuk akhlak anak-anak jalanan agar menjadi manusia yang benar.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan rangkain masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana Peranan Organisasi Masyarakat Betawi Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Pondok Pesantren yatim ziyadatul mubtadi'ien Jl. Raya penggilingan No.100 Pedaengan Cakung – Jakarta Timur? “.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data serta informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai peranan Ormas Betawi dalam Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Pondok Pesantren. Sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, ada pun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat pada umumnya serta menambah wawasan tentang peranan Organisasi Masyarakat Betawi dalam pemberdayaan anak jalanan melalui pondok pesantren.

2. Secara Praksis

- a. Dapat memberikan informasi mengenai program Ormas Betawi dalam pemberdayaan anak jalanan melalui pondok pesantren pada masyarakat pedaengan-cakung pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah di Kelurahan Cakung Jakarta Timur dalam pembangunan wilayahnya.
- c. Sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana peranan Ormas Betawi dalam pemberdayaan anak jalanan di Cakung-Jakarta Timur.
- d. Menambah dan memperluas pengetahuan serta cakrawala berpikir mengenai peranan Ormas Betawi dalam Pemberdayaan anak jalanan melalui pondok pesantren.